

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
1.	Dokumen Keuangan	1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CALK) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening-Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. <i>Exercise</i>/perhitungan RKAKL (sebelum disampaikan dan dibahas Kementerian Kesehatan); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 7. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit; 10. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D); dan 11. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2.	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)	1. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan); 2. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN; 3. Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang) 4. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);
3.	Dokumen Hukum	1. Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo; dan 2. Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo.
4.	Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia	1. Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran; 2. Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan Keputusan MKDKI; 3. Profil umum dokter yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/kabupaten/kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi; 4. Profil data pribadi dokter yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum; 5. Informasi jadwal persidangan MKDKI; 6. Seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran kecuali keputusan MKDKI dan keputusan KKI 7. Identitas lengkap dokter yang diadukan dan/atau yang

		terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran; 8. Identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh MKDKI.
5.	Dokumen Identitas Masyarakat	Identitas pemberi dan pemohon informasi.
6.	Dokumen Pengawasan	1. Laporan pengaduan individu/masyarakat; 2. Laporan hasil audit pemeriksaan reguler; 3. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus; 4. Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 5. Laporan reviu keuangan yang belum diaudit; 6. Laporan hasil pengawasan internal.
7.	Dokumen Kepegawaian	1. Kasus kepegawaian PNS kemenkes (kasus disiplin/masih dalam proses hukum); 2. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyingkiran/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 7. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 8. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 9. Daftar hukuman disiplin pegawai; 10. Daftar permasalahan pegawai.
8.	Dokumen Terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1. Dossier/ dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT; 2. Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi; 3. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi; 4. Dokumen permohonan izin usaha industri farmasi; 5. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; 6. Dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; 7. Dokumen permohonan izin produksi kosmetika; 8. Dokumen permohonan IP, IT, EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor; 9. Dokumen permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS (<i>Special Access Scheme</i>); 10. Omzet PBF berdasarkan sistem <i>e-report</i> PBF

9.	Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1. Hasil penelitian yang belum dipublikasikan; 2. <i>Raw data</i> hasil penelitian; 3. Data identitas/keterangan subjek penelitian/ responden dan hasil pemeriksaan klinis dan/atau transkrip wawancara terkait penelitian; 4. Data penelitian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan); 5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden; 6. Protokol permohonan <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA); 7. Protokol penelitian.
10.	Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan	1. Hasil Penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan; 2. Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik;
11.	Dokumen Kependidikan	1. Laporan pendidikan per semester; 2. Laporan pendidikan per tahun; 3. Hasil seleksi calon mahasiswa; 4. Nilai mahasiswa/ transkrip nilai.
12.	Dokumen Tertentu	1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia; 2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (yang bersifat rahasia); 3. Matrik tindak lanjut rakorpim; 4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia; 5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia; 6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia; 7. Brafaks (berita <i>faximile</i>) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia.
13.	Dokumen yang Terkait dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi	1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen <i>database</i>; 3. <i>Bandwidth management</i>; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet protokol/<i>IP address private</i> 7. Lokasi server.